

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta
- Aksara. Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiarjo, Miriam. (1993). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik Berpaas Perempuan*. Yogyakarta: Kanasius
- Salman, Muhammad. (2009). *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008*. Medan : Universitas Sumatra Utara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi.
- Phillips, Anne.(1995). *The Politics of presence*. Oxford:oxport University Press.
- Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). *The Concept of Representation*. Barkeley: University of California Press.Menguji perspektif teori representasi

Jurnal

- Barrul Fuad. (2000). *DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Jurnal Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1
- Djoko Prakoso, (1985). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Jakarta : Rajawali Press . 1985), hal : 78.
- Josef Riwo Kaho. (1991). *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*. Jakarta : CV. Rajawali. hal. 57.
- Josmagel Harapan Sianturi. (2014). *Analisis Terhadap Hubungan Anggota Dprd Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)*. Jurnal FISIP : Vol. 1. No. 1-9.

Muhamad Zuhriansyah. (2013). *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan)*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2.

Marwati, Lilis. 2008. '*Studi tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Dalam Menyikapi Aspirasi Masyarakat*'. Skripsi. Universitas Yapis Papua, Papua.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pasal 53 UU No 10 tahun 2004 menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan.
3. Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).